

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(P-RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KECAMATAN GUDO
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam UU nomor 23 Tahun 2014 pasal 221 menyebutkan Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut kecamatan berada dalam posisi strategis dimana Camat sebagai pimpinan tertinggi harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, juga harus memberikan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023 (P-Renja OPD 2023) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 6 (enam) bulan. Renja Perubahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran melalui porogram dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- Renja merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
- Merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Gudo.

Mengingat arti penting dari Renja, maka penyusunannya diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD yang dalam hal ini Rencana Kerja Kecamatan Gudo, penyusunan tersebut harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa dan Kecamatan mencakup 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top-down, bottom up yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses Forum SKPD.

Penyusunan Perubahan Renja OPD Kecamatan Gudo Tahun 2023 mengacu pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 yang merupakan bagian dari masa transisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2019-2023 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-5 (lima) perodesasi 2019-2023 dari dokumen RPJPD yaitu “**Percepatan Pemulihan Ekonomi Dengan Akselerasi pertumbuhan sektor unggulan dengan peningkatan kualitas produk dan daya saing pasar**”, serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gudo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perbub Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87/2023 Tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penetapan PRKPD Kabupaten Jombang

19. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 050/371/415.01/2023, tanggal 29 Mei 2023, Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKpd Tahun 2023 dan Perubahan renja PD tahun 2023
20. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 900/566/415.01/2023, tanggal 01 Agustus 2023, Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gudo Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gudo Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pelaku pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan di era globalisasi dimana informasi terus berkembang maka pada tahun 2023 diarahkan pada pencapaian Misi yang ke-1 yakni: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

Dalam rangka mendukung Misi tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gudo pada tahun 2023 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Unsur Kewilayahan, yang dijabarkan dalam 6 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 11 Kegiatan serta 22 Sub kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gudo Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Pelaksanaan Penatausahaan dan

			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Umum Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan • Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program (program 1 s/d program 6) pada triwulan II mencapai 55,55% dengan penyerapan anggaran sebesar 50,14% sedangkan realisasi Renstra Perangkat Daerah pada triwulan II tahun 2023 rata-rata capaian kinerja dari seluruh program (program 1 s/d program 6) pada triwulan II mencapai 96,88% dengan

penyerapan anggaran sebesar 82,80%

Berikut disajikan secara terperinci pencapaian kinerja mulai dari Program, Kegiatan sampai pada Sub Kegiatan pada triwulan II serta hambatan dan permasalahan yang terjadi sekaligus kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut, yakni:

A. Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota dengan capaian kinerja yakni 50 % dan penyerapan anggaran sebesar 50,27%.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja yakni 50 % dan penyerapan anggaran sebesar 47,34%.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD capaian kinerja yakni 33,33% dan penyerapan anggaran 54,23%
 - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja yakni 40% dan penyerapan anggaran 37,47%
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah capaian kinerja yakni 50 % dan penyerapan anggaran 51,30%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN capaian kinerja yakni 100% dan penyerapan anggaran 51,37%
 - Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD capaian kinerja yakni 100% dan penyerapan anggaran 28,36 %
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD capaian kinerja yakni 50% dan penyerapan anggaran 50 %
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Daerah capaian kinerja yakni 50% dan penyerapan anggaran 29,91%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor yakni dengan pencapaian kinerja sebesar 66,67% dan penyerapan anggaran 32,02%

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yakni dengan pencapaian kinerja sebesar 86,36% dan penyerapan anggaran 53,83%
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggadanaan yakni dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran 52,37%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yakni dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran 24,37%
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yakni dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran 29,28%
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yakni dengan pencapaian kinerja sebesar 50% dan penyerapan anggaran 6,62%
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yakni 50% dan penyerapan anggaran 44 %
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yakni 50% dan penyerapan anggaran 34,68%
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yakni 50% dan penyerapan anggaran 49,07%
- e. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja yakni 50% dan penyerapan anggaran 46,49%
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan yakni 8,83% dan penyerapan anggaran 39,71%
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yakni 56,52% dan penyerapan anggaran 55,83%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik Daerah capaian kinerja yakni 50% serta penyerapan anggaran sebesar 53,35%
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan capaian kinerja yakni 50% serta penyerapan anggaran sebesar 53,35%
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan capaian kinerja yakni 50% serta penyerapan anggaran sebesar 53,35%

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerja sesuai target yakni 50% serta penyerapan anggaran sebesar 55,91%.
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerja yakni 50% serta penyerapan anggaran sebesar 55,91%
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa capaian kinerja yakni yakni 50% serta penyerapan anggaran sebesar 55,91%

4. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum dengan capaian kinerja sesuai target yakni 50% serta penyerapan anggaran sebesar 28,99%.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah capaian kinerja yakni 50% serta penyerapan anggaran sebesar 28,99%.
 - Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan capaian kinerja yakni 0% karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada tribulan 3, serta dengan penyerapan anggaran sebesar 18,65%
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi

Pimpinan di Kecamatan dengan capaian kinerja yakni 0% serta dengan penyerapan anggaran sebesar 47,22%

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan capaian kinerja sesuai target yakni 75% dan penyerapan anggaran sebesar 56,04%.

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa dengan capaian kinerja sesuai target yakni 75 % dan penyerapan anggaran sebesar 56,04%.

- Sub Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan capaian kinerja sesuai target yakni 75 % dan penyerapan anggaran sebesar 56,04%.

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian kinerja sesuai target 50% dan penyerapan anggaran sebesar 4,75%.

a. Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah dengan capaian kinerja sesuai target 50% dan penyerapan anggaran sebesar 19,22%.

- Sub Kegiatan Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dengan capaian kinerja sesuai target 50% dan penyerapan anggaran sebesar 19,22%.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya Atau tidaknya Target Kinerja Program/Kegiatan.

Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan:

1. Dukungan dan komitmen Camat Gudo, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian

- target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Gudo untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
 3. Kompetensi SDM aparatur Kecamatan Gudo yang memadai

C. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gudo. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Gudo sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gudo Tahun 2018 - 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Gudo pada umumnya,
- ✓ Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gudo berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Gudo.

D. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:

1. Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu.
2. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD Tahun 2023.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi serta memberikan pendampingan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada OPD terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Gudo merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Gudo, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Gudo adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Gudo menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

Sampai dengan periode tribulan II tahun 2023, Kecamatan Gudo telah menganggarkan penyusunan Renstra sejumlah 1 dokumen, rencana kerja sejumlah 1 dokumen, laporan capaian kinerja sebanyak 3 dokumen, dan laporan keuangan sebanyak 1 dokumen. Capaian sampai dengan saat ini Renstra RPD telah tersusun, tetapi baru disahkan pada tanggal 11 Juli sedangkan Renja Tahun 2024

telah selesai disusun sebanyak 1 Dokumen dan 1 dokumen renja perubahan 2023 akan disusun sebelum dilaksanakan PAK 2023.

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terselenggaranya Musrenbang kecamatan serta musrenbang di 18 (Delapan belas) Desa, terlaksananya, tersedianya data Profil kecamatan, dilaksanakannya kegiatan pembinaan administrasi desa oleh Tim Pembina Kecamatan, pembinaan PKK sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH, Rastra, KIP, KIS, da KJS.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Gudo menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dengan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gudo
Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Gudo Minimal BAIK	-	-	64,03	63,05	N/A	N/A	N/A	
2	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa	-	-	22 komponen	22 komponen	N/A	N/A	N/A	
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum	-	-	8 komponen	8 komponen	N/A	N/A	N/A	
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	11 komponen	11 komponen	N/A	N/A	N/A	
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya	-	-	16 komponen	16 komponen	N/A	N/A	N/A	
6	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100	100	N/A	N/A	N/A	
7	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	7 rekening	17rekening	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah pemenuhan jasa Administrasi teknis perkantoran	-	-	2 rekening	N/A				
8	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	-	-	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
9	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun	-	-	12 m2	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	72 unit	16 unit	N/A	N/A	N/A	
	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang dipelihara	-	-	1.097 m2	234m2	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	-	33 unit	16 unit	N/A	N/A	N/A	
14	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian	-	-	22 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	Persentase dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	-	-	100%	100%	N/A	N/A	N/A	
17	Jumlah Dokumen Renstra Kec. Gudo yang tersusun	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	Jumlah Dokumen Renja Kec. Gudo yang tersusun	-	-	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	
19	Jumlah dokumen Laporan LKJIP Kec. Gudo yang tersusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	
20	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Gudo yang tersusun	-	-	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
2	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	N/A	N/A	3 dokumen	2 dokumen	N/A	
4	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	-	-	N/A	N/A	5 laporan	5 laporan	N/A	
5	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
6	<i>Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
7	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Gudo yang difasilitasi	-	-	N/A	N/A	14 bulan	14 bulan	N/A	
8	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	12 kali	N/A	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	-	-	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	
10	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Gudo</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	
11	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	18 stel	N/A	
12	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
13	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	
14	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	11 bulan	N/A	N/A	
15	Jumlah pemenuhan barang cetak	-	-	N/A	N/A	1 jenis	1 jenis	N/A	
16	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	-	-	N/A	N/A	30.000	30.000	N/A	
17	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	-	-	N/A	N/A	1 jenis	1 jenis	N/A	
18	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	N/A	N/A	12 kali	6 dok	N/A	
19	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	-	-	N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	N/A	
20	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
21	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	N/A	N/A	1 unit	1 unit	N/A	
22	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	-	-	N/A	N/A	10 unit	5 unit	N/A	
23	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
24	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	
25	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	-	-	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Jumlah penyediaan benda pos	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
27	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
28	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-	-	N/A	N/A	1 unit	1 unit	N/A	
29	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	-	-	N/A	N/A	30 unit	12 unit	N/A	
30	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Gudo yang dipelihara	-	-	N/A	N/A	N/a	1 paket	N/A	
31	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	-	N/A	N/A	7 unit	20 unit	N/A	
32	Nilai Paten Kecamatan	-	-	N/A	N/A	80,95	80,47	72	
33	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
34	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
35	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
36	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
37	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
38	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>	-	-	N/A	N/A	2 laporan	2 laporan	N/A	
39	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	
40	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	2 kegiatan	2 kegiatan	N/A	
41	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	-	-	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
43	<i>Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum</i>	-	-	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	N/A	
44	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	N/A	
45	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
46	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
47	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	-	-	N/A	N/A	18 dokumen	18 dokumen	N/A	
48	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	-	-	N/A	N/A	18 laporan	18 laporan	N/A	
49	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	N/A	N/A	100%	100%	N/A	
50	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	N/A	N/A	36 lembaga	36 lembaga	N/A	
51	<i>Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu</i>	-	-	N/A	N/A	18 dokumen	18 dokumen	N/A	
52	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	-	-	N/A	N/A	36 lembaga	36 lembaga	N/A	
53	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	-	-	N/A	N/A	18 dokumen	18 dokumen	N/A	
54	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	-	-	N/A	N/A	18 BUMDes	18 BUMDes	N/A	
55	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	-	-	N/A	N/A	18 TP PKK	18 TP PKK	N/A	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
2	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	
5	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
6	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	19 orang/bulan	
8	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	
9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	
10	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Gudo	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
13	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	22 paket	
14	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	
15	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	2 paket	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	
17	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	
18	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	3 paket	
19	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
20	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	3 unit	
22	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	25 laporan	
25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
27	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 unit	
28	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
29	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	23 unit	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Nilai Paten Kecamatan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	72	
31	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
32	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	
33	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
34	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
35	<i>Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	2 laporan	
36	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	
37	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	
38	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	
39	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
40	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	
41	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	
42	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

NO	Indikator	SPM/ NSPK/ SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa								
43	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
44	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	
45	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	
46	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
47	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	36 lembaga	
48	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	36 lembaga	
49	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Gudo dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Gudo, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Gudo sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Gudo.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Gudo yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Gudo sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Gudo untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wilayah Kecamatan Gudo sudah bergerak kearah ekonomi maju dengan mayoritas penduduknya tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja tetapi juga sektor industri dan perdagangan. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gudo pada tahun 2023 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal

tersebut telah ditetapkan di dalam Visi dan Misi RPJMD tahun 2018 - 2023 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kab. Jombang Tahun 2018-2023.
 - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Gudo belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2023 yakni peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih sering crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e- KTP di Kecamatan Gudo saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;
- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Gudo cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal .

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Gudo terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

a. Perencanaan Pembangunan

- Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2018-2023 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun Kecamatan Gudo dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Gudo dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tribulan II, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Gudo melalui 6 (Enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di setidaknya di tingkat Kabupaten kemudian di tingkat Provinsi.

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Gudo sampai dengan Tribulan II tahun 2023 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 yang merupakan bagian dari masa transisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-5 perodesasi 2018-2023 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Gudo Tahun 2023.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Gudo dalam melaksanakan Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan aparatur yang cerdas, terampil, bertanggungjawab, inovatif dan kapabel. Hal tersebut berarti aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Kecamatan Gudo mempunyai peran penting dalam proses pembangunan mendukung keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi dan politik di Kecamatan Gudo membutuhkan sinergitas antar seluruh SKPD, disebabkan terbatasnya anggaran dengan kebutuhan pembangunan yang cukup banyak. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kebijaksanaan dalam melihat secara komprehensif demi peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gudo.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Gudo
Kabupaten Jombang

Perangkat Daerah: Kecamatan Gudo

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Anggaran	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	72	5.951.200	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	100	5.951.200	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	5.951.200
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	%	100%	5.500.000	2	Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Dokumen	36	5.500.000	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	36	5.500.000

3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	%	100	6.179.900	3	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	kegiatan	12 kegiatan	6.179.900	3	Koordinasi/sinergi Dengan perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturanperundang-Undangandan/atau kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	laporan	12	6.179.900
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	%	100	46.254.900	4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	lembaga	36	46.254.900	4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	4	46.254.900
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Lembaga	36													
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	%	100%	22.379.800	5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	Laporan	2	22.379.800	5	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	100	14.279.800

							2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	dokumen	4		6	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	4	8.100.000	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100%	2.632.032.457	6	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	100%	10.379.900	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	3	6.109.900
											8	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	4.270.000	
						7	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	- Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	100%	2.335.483.707	9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bulan	19	2.261.065.957

											14	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	buku	1	50.600.000	
											15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	2.220.000	
											16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	25.060.000	
											17	Penyediaan Barang Cetak dan penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	13.366.850	
						9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana	%	100	17.235.800	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	17.235.800
						10	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	114.309.700	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	24	40.309.700

											20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	25	74.000.000	
						11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100 %	37.540.000	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	1	21.750.000
												22	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	23 unit	20	15.790.000

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Kecamatan Gudo Tahun 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020–2024. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Sementara itu, Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu :

- (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
- (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045 yang menjadi bagian integral dari RPJMN Tahun 2020–2024. Upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 dimulai pada periode RPJMN Tahun 2020–2024.

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 ditetapkan lima arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan SDM,

Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang meliputi :

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2022 dimana merupakan bagian dari masa transisi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2014-2018 yang berpedoman pada Misi 1 yaitu ‘Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional’.

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari Perubahan Renja Tahun 2023 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran kinerja yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Gudo Tahun 2019-2023

SASARAN			ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI			
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Gudo	Nilai AKIP tahun n	Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Gudo	IKM Kecamatan Gudo tahun n	Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	IPP Kecamatan Gudo	IPP Kecamatan Gudo tahun n	Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait ----- x	Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

	100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum dikoordinasikan ke instansi terkait			
Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ----- 100% Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah evaluasi Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100% Jumlah evaluasi Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan program dan kegiatan

- Pencapaian Visi dan Misi dan indicator kinerja jangka menengah (IKU dan IKD)

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Gudo diarahkan untuk mencapai visi Bupati Jombang yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”. Untuk Kecamatan difokuskan pada Misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional Dengan indikator sasaran adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik;

- Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs adalah merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Gudo diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Gudo Program dan kegiatan yang dirancang pada RENJA 2022 PD KECAMATAN GUDO yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitas dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

➤ Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang

dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Gudo diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kawasan strategis menjadi fokus pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029.
- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
Kecamatan Gudo sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan pembuatan lis, pengrajin sepatu, dan sektor pertanian baik padi, jagung, sayur serta tembakau pada musim tertentu. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Gudo melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.
- Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II

Hasil evaluasi terhadap sasaran dan program sampai dengan tribulan II tahun 2023 yakni

a. Evaluasi sasaran

- Nilai SAKIP pada tribulan II telah dilaksanakan namun hasilnya belum diformalkan.
- Penilaian IKM akan terlihat hasilnya pada akhir tahun
- IPP Kecamatan pada tribulan II belum diketahui hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Gudo tahun 2023
- Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dapat diketahui pada akhir tahun
- Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dapat diketahui pada akhir tahun
- Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait dapat diketahui pada akhir tahun

b. Evaluasi Program

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan tribulan II telah dilaksanakan program dan kegiatan rutin kantor kecamatan
- Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan tribulan II sudah dilakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sesuai SOP dan SPP
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sampai dengan tribulan II sudah dilaksanakan monev sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

- Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sampai dengan tribulan II belum dilaksanakan kegiatan PHBN karena direncanakan pada tribulan III, namun kegiatan peringatan PHBA telah selesai dilaksanakan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan tribulan II sudah ada kegiatan pembinaan BUMDesa dan TP PKK
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai dengan tribulan II sudah menyampaikan laporan pelanggaran perda/perkada dan trantibum secara berkala ke Satpol PP Jombang

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

➤ **Perubahan Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gudo Tahun 2023 mencakup 6 (enam) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian verifikasi keuangan SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan bahan logistic kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undnagan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuoltasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor atau bangunan lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

- 1) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Bidang Penegakan Peratiran Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan asset Desa

➤ **Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya**

Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Perubahan Renja 2023 berasal dari APBD Kab. Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 2.718.298.257,-

➤ **Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja 2023 disajikan dalam table lampiran 4**

																	realisasi.
7	01	01	2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	N/a	100%	10,379,900	25%	2,810,000	100%	10,379,900	-	-	-	tidak ada perubahan target dan anggaran
7	01	01	2.01.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	N/a	3 dok	6,109,900	2 dok	1,713,000	3 dok	6,109,900	-	-	-	
7	01	01	2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	N/a	5 laporan	4,270,000	2 laporan	1,097,000	5 laporan	4,270,000	-	-	-	

7	01	01	2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	N/a	100%	2,335,483,7 07	25%	888,094,44 8	100%	2,445,282,3 57	-	109,798,6 50	terdapat penambahan anggaran pada sub gaji dan tunjangan serta penatausahaan keuangan
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	N/a	100%		100%		100%		-		
7	01	01	2.02.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Org/bln	N/a	19 Org/bl n	2,261,065,9 57	19 org/bl n	869,844,94 8	18 Org/bln	2,368,975,9 57	-	107,910,0 00	penambahan pada rekening tunjangan fungsional umum, dan tunjangan TPP pada semua rekening yang kurang untuk pemenuhan gaji dan TPP selama tahun 2023 meskipun dengan perhitungan setelah pengurangan pegawai yang pensiun
7	01	01	2.02.03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	N/a	12 dokum en	71,598,000	3 doku men	17,899,500	12 dokumen	73,638,000	-	2,040,000	penambahan Honor PP selama 3 bulan
7	01	01	2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	N/a	1 lapora n	2,819,750	1 doku men	350,000	1 laporan	2,668,400	-	(151,350)	penambahan pada FC

7	01	01	2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	N/a	100%	117,083,350	100%	29,121,400	100%	113,200,350	0	(3,883,000)	ada pengurangan anggaran pada sub kegiatan penyediaan bahan bacaan, namun tidak merubah target
7	01	01	2.06.02	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	N/a	22 paket	23,431,500	10 paket	9,078,700	22 paket	23,431,500	-	-	tidak ada perubahan target dan anggaran
7	01	01	2.06.04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	N/a	1 paket	50,600,000	1 paket	12,330,000	1 paket	52,200,000	-	1,600,000	tidak ada perubahan target dan anggaran
7	01	01	2.06.05	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	N/a	2 paket	13,366,850	1 paket	5,582,500	2 paket	13,366,850	-	-	tidak ada perubahan target dan anggaran
7	01	01	2.06.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	N/a	1 dokumen	2,220,000	1 dokumen	520,000	1 dokumen	1,560,000	-	(660,000)	untuk 1 bulan hanya membutuhkan 130ribu jadi akan ada kelebihan anggaran yang akan dialihkan untuk kegiatan lain dari sisa kelebihan tersebut, dengan memastikan bahwa target akan tetap dapat tercapai dengan pengalihan anggaran tersebut

7	01	01	2.06.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	N/a	4 laporan	25,060,000	1 laporan	840,000	4 laporan	20,237,000	-	(4,823,000)	pengurangan berdasarkan sisa anggaran sampai TB.2 masih sedikit sehingga khawatir tidak bisa terserap semuanya
7	01	01	2.06.01	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	N/a	3 paket	2,405,000	12 bulan	770,200	3 paket	2,405,000	-	-	
7	01	01	2.07	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	N/a	100%	17,235,800	100%	17,234,800	100%	223,097,700	-	205,861,900	penambahan gedung dan sarpras kantor sesuai surat permintaan penambahan anggaran PAK 2023, surat Nomor 900/35/415.55/2023 tanggal 9 Januari 2023
7	01	01	2.07.09	Sub Keg : Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	N/a	-	-	-	-	2 unit	146,696,300	2 unit	146,696,300	
7	01	01	2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	N/a	3 unit	17,235,800	3 unit	17,234,800	7 unit	76,401,400	4 unit	59,165,600	
7	01	01	2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	N/a	100%	114,309,700	42%	42,051,085	100%	102,658,150	-	(11,651,550)	dilakukan pengurangan tanpa merubah target, karena anggaran dirasa terlalu banyak jika melihat realisasi pada tribulan sebelumnya

7	01	01	2.08.02	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	N/a	24 laporan	40,309,700	5 laporan	11,739,289	24 laporan	35,658,150	-	(4,651,550)	anggaran listrik terlalu banyak dengan melihat realisasi sampai bulan ini, sehingga akan dialihkan pada kegiatan lain
7	01	01	2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	N/a	25 laporan	74,000,000	5 laporan	30,311,796	25 laporan	67,000,000	-	(7,000,000)	kegiatan berupa honor instruktur senam akan dialihkan pada kegiatan lain yang lebih membutuhkan, serta pengurangan honor Honoror karena yang bersangkutan mengundurkan diri
7	01	01	2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	N/a	100%	37,540,000	25%	13,788,715	100%	37,540,000	-	-	penambahan kinerja dan anggaran pada sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor
7	01	01	2.09.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	N/a	12 unit	21,750,000	1 unit	5,583,715	12 unit	21,750,000	-	-	target dan kinerja anggaran tidak berubah

7	01	01	2.09.10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	N/a	23 unit	15,790,000	8 unit	8,205,000	23 unit	15,790,000	-	-	target dan kinerja anggaran tidak berubah
7	01	02		Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	72	N/a	72	5,951,200	N/a	1,572,500	72	5,951,200	-	-	target dan kinerja anggaran tidak berubah
7	01	02	2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	N/a	100%	5,951,200	25%	1,572,500	100%	5,951,200	-	-	
7	01	02	2.02.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	N/a	4 laporan	5,951,200	1 laporan	1,572,500	4 laporan	5,951,200	-	-	

7	01	05		Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	N/a	100%	22,379,800	0%	4,825,300	100%	22,379,800	-	-	target dan kinerja anggaran tidak berubah
					Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/a	100%		25%		100%		-		
7	01	05	2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	2 laporan	N/a	2 laporan	22,379,800	-	4,825,300	2 laporan	22,379,800	-	-	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	N/a	4 laporan		1 laporan		4 laporan		-		
7	01	05	2.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	N/a	100 orang	14,279,800	0	2,663,000	100 orang	14,279,800	-	-	

7	01	05	2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	N/a	4 dokum en	8,100,000	1 doku men	2,162,300	4 dokumen	8,100,000	-		
7	01	04		Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	N/a	100%	6,179,900	25%	1,187,500	100%	6,179,900	-	-	target dan kinerja anggaran tidak berubah
7	01	04	2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	N/a	12 kegiat an	6,179,900	3 kegiat an	1,187,500	12 kegiatan	6,179,900	-		
7	01	04	2.02.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	N/a	12 lapora n	6,179,900	3 kegiat an	1,187,500	12 laporan	6,179,900	-	-	

7	01	06		Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	N/a	100%	5,500,000	100%	1,887,500	100%	5,500,000	-	-	target dan kinerja anggaran tidak berubah
					Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	N/a	100%		50%		100%		-		
7	01	06	2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	36 dokumen	N/a	36 dokumen	5,500,000	18 dokumen	1,887,500	36 dokumen	5,500,000	-	-	
7	01	06	2.01.03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	N/a	36 dokumen	5,500,000	18 dokumen	1,887,500	36 dokumen	5,500,000	-		
7	01	03		Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	N/a	100%	46,254,900	25%	24,736,000	100%	40,038,900	-	(6,216,000)	pengurangan pada honor narasumber

					2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	36 lembaga	N/a	36 lembaga		36 lembaga		36 lembaga		-	
7	01	03	2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	36 laporan	N/a	36 laporan	46,254,900	36 laporan	24,736,000	36 laporan	40,038,900	-	(6,216,000)
7	01	03	2.01.03	Sub Kegiatan: peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4 laporan	N/a	4 laporan	46,254,900	1 laporan	24,736,000	4 laporan	40,038,900	-	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gudo tahun 2023 yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Gudo. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Gudo di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2005-2025.

1.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Gudo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gudo Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023
- b. Kecamatan Gudo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA P 2023) Kecamatan Gudo dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Kecamatan Gudo Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Gudo Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.

1.3. Rencana Tindak Lanjut.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gudo selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Gudo Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Perubahan Renja Kecamatan Gudo juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga dengan adanya Perubahan Renja Kecamatan Gudo ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Bupati serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang. Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta Desa dalam wilayah kecamatan Gudo, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Gudo Tahun anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan.

Gudo, 01 Agustus 2023


CAMAT GUDO
ARIEF HIDAJAT, SH., M.SI
Pembina
NIP. 19700105 199402 1 002